

Rezim Militer dan Otoriter di Mesir, Suriah dan Libya

Mohammad Riza Widyarsa

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta 12110

Email: riza@uai.ac.id

Abstrak - Pemerintahan otoriter di Mesir, Libya dan Suriah tidak lepas dari kekuasaan rezim militer yang melakukan kudeta di ketiga negara tersebut. Makalah ini melihat kasus bagaimana dan mengapa rezim militer di ketiga negara tersebut bisa berkuasa lebih dari satu dekade. Rezim yang diteliti adalah Gammal Abdul Nasser di Mesir, Muammar Gaddafi di Libya, dan Hafiz al-Assad di Suriah, karena ketiga orang inilah yang berhasil melakukan kudeta dan berkuasa dalam kurun waktu yang lama. Nasser, Gaddafi dan al-Assad berhasil bertahan dengan menggunakan aparatus militer, polisi rahasia serta partai politik. Sedangkan ada yang menggunakan *network* antar suku seperti yang diterapkan oleh Gaddafi. Namun ketiga pemimpin ini banyak memperoleh kekuatan politiknya karena latar belakang militer mereka. *Esprit de corps*, jaringan komunikasi dan hirarki ala militer membuat kekuasaan mereka tetap terjaga, ditengah arus oposisi yang mereka hadapi. Perkembangan politik internasional juga membuat kekuasaan para pemimpin ini terjaga. Seringkali negara-negara Barat menghadapi musuh yang sama-sama dihadapi oleh para pemimpin ini. Hal ini terlihat bagaimana Gaddafi dan al-Assad menjalin hubungan dengan Barat untuk menghadapi kelompok politik Islam.

Abstract - This article focused on how the military regime in Egypt, Libya, and Syria were able to hold power for more than one decades. Gammal Abdul Nasser of Egypt, Muammar Gaddafi of Libya, and Hafiz al-Assad of Syria became the main focused, because these three leaders were managed to stage a coup and hold power in their respected countries. Nasser, Gaddafi, and al-Assad managed to hold power, because they used military, secret police, and political party as their apparatus. While like Gaddafi, the network of tribal relations were

used to secure his positions. However, all three got much of their power from their military background. *Esprit de corps*, communication network, and military hierarchy make them able to withstand all oppositions. The development of the international politics also in some way helped them to secure power. Some of the Western countries have to forge alliance with Egypt, Libya and Syria in order to fight the Islamic political groups.

Keywords - Nasser, Gaddafi, al-Assad, Egypt, Libya, Syria, regime, military, authoritarian.

I. PENDAHULUAN

Hampir tidak ada yang mengira bahwa di penghujung tahun 2010 dan di awal tahun 2011, terjadi pergolakan besar-besaran di Dunia Arab. Gejolak ini terjadi dari Afrika Utara sampai ke Timur Tengah, dari Aljazair sampai ke Bahrain. Satu persatu rezim diktator bertumbangan, yaitu Zein al-Abidine Ben Ali di Tunisia dan Husni Mubarak di Mesir. Namun demikian rezim lainnya di Aljazair, Suriah, Yaman, Libya dan Bahrain masih bertahan. Para penguasa yang sedang menghadapi pergolakan ini terdiri dari berbagai macam pemerintahan, apakah itu republik ataupun monarki. Cara mereka berkuasa pun juga mereka dapatkan dengan cara yang berbeda, ada yang mendapatkannya melalui kudeta, ditunjuk oleh parlemen, atau diwariskan dari sang ayah.

Latar belakang dari para pemimpin ini juga berbeda-beda, ada yang berlatar belakang bangsawan, politikus, serta militer. Tentu dengan latar belakang yang berbeda ini para pemimpin di Dunia Arab memerintah rakyat mereka dengan cara masing-masing. Ada yang memerintah dengan memberikan kemewahan bagi rakyatnya, dengan harapan mereka tidak akan melakukan kudeta, namun ada juga yang menerapkan cara-cara

represif. Ada kemungkinan perbedaan penerapan kekuasaan terhadap masyarakat, berpengaruh pada latar belakang sang pemimpin. Ini yang akan dibahas pada bab ini, di mana tulisan ini akan memfokuskan kepada rezim otoriter yang ada di Dunia Arab yang berlatar belakang militer. Seperti di negara-negara Afrika dan Amerika Latin, di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, militer memainkan peran penting dalam politik. Para perwira aktif yang menjadi anggota partai dan menjadi anggota kabinet, adalah hal yang lumrah di sejumlah negara Arab. Bahkan Mesir dan Suriah, pernah mempunyai presiden yang berlatar belakang militer. Tulisan ini berusaha mengulas bagaimana peran militer di Suriah, Libya dan Mesir, sehingga dapat berkuasa di ketiga negara tersebut. Serta, mengapa di ketiga negara tersebut pemerintahan cenderung menerapkan sistem yang otoriter. Berbeda dengan Libya dan Mesir, Suriah di masa Bashar al-Assad tidak bisa dikatakan secara total negara dengan rezim militer. Namun demikian, pemerintahan Hafez al-Assad adalah sebuah pemerintahan rezim militer yang menerapkan cara-cara represif, yang akan masuk ke dalam pembahasan berikut.

II. MESIR

Negara yang dikenal dengan piramid dan kisah Fir'aun, Mesir juga dikenal sebagai sebuah negara dengan rezim militer di Dunia Arab. Para presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat dan Husni Mubarak, semua berasal dari kalangan militer. Bahkan seakan-akan untuk menjadi presiden Mesir, harus dari kalangan militer.

Meskipun Mesir sejak masa Nasser dikenal sebagai sebuah republik, namun Mesir pernah dipimpin dengan sistem monarki. Nasser kemudian menggulingkan kerajaan Mesir pada tahun 1952 dan menggantikan sistem pemerintahan menjadi republik. Kerajaan Mesir yang digulingkan oleh Gammal Abdul Nasser, adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin bukan oleh warga Mesir. Muhammad Ali, sang pendiri dinasti kerajaan Mesir, adalah gubernur Mesir yang ditunjuk oleh Sultan Turki Usmani Selim III pada tahun 1805. Ali bukanlah seorang Arab Mesir, melainkan dia adalah perwira kesultanan Usmani yang berasal dari entis Albania, namun lahir dan besar di Yunani.¹ Setelah menjadi gubernur Mesir,

Ali berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh Usmani dengan membangun industri dan militer, terlepas dari persetujuan Istanbul. Bahkan pada tahun 1831-1832, pasukan Muhammad Ali yang dipimpin oleh anaknya Ibrahim, menyerbu Suriah dan sempat mengalahkan pasukan Usmani. Ibrahim sendiri akhirnya menjadi gubernur Suriah pada tahun 1833 sampai dengan tahun 1840, disaat pasukan Usmani, yang dibantu dengan pasukan Inggris, berhasil mengalahkan Ibrahim. Meskipun Ibrahim berhasil diusir dari Suriah, Muhammad Ali tetap mempertahankan kekuasaannya di Mesir. Bahkan keturunan Ali diperbolehkan oleh para sultan Usmani untuk tetap memerintah di Mesir, sampai pada jatuhnya Turki Usmani pada tahun 1921. Sejak saat itu keturunan Ali bukan lagi sebagai gubernur Mesir, akan tetapi menjadi raja di negara tersebut.

Raja Faruq, yang memerintah Mesir dari tahun 1936 sampai dengan 1952, dikenal sebagai pemimpin yang tidak kompeten dan korup. Ketimpangan antara warga kaya dan warga miskin sangat besar. Ketika kudeta para perwira Mesir dilakukan, sekitar 0,4 persen warga Mesir memiliki 35 persen tanah subur.² Terlihat sekali ketimpangan ekonomi yang ada di Mesir pada saat raja Faruq berkuasa. Hanya sebagian kecil warga Mesir yang dapat menikmati kekayaan negara mereka, sedangkan sebagian besar warga tidak menikmati hasil perekonomian negara mereka. Korupsi juga dikenal sangat merajalela ketika masa pemerintahan Faruq. Perampokan uang negara ini berimbas kepada anggaran militer Mesir yang kemudian berimbas pada keterlibatan Mesir pada Perang Arab-Israel ditahun 1948-1949. Karena minimnya anggaran untuk latihan serta pembelian persenjataan, yang kemungkinan besar tersedot oleh korupsi, pasukan Mesir mengalami kekalahan di medan pertempuran dalam menghadapi Israel.³ Ditambah lagi dengan masih berkuasanya Inggris di Mesir secara politis, terutama dengan keberadaan negara tersebut di Terusan Suez. Hal ini semakin memicu kebencian terhadap raja Faruq, terutama dikalangan militer.

Sebagai seorang nasionalis dan sebagai seorang militer, Kolonel Gammal Abdul Nasser merasa bahwa pemerintahan raja Faruq tidak dapat ditolerir. Kekecewaan para perwira militer Mesir

¹ Cleveland, William L. *A History of The Modern Middle East*. Westview Press, Boulder: 2004. Hal. 65-66.

² Cleveland, William L. hal. 302.

³ *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*. David E. Long & Bernard Reich Ed. Westview Press: Boulder. 2002. hal. 343.

mencuat setelah menyadari bahwa korupsi dan ketidakmampuan raja Faruq, menyebabkan kekalahan pasukan Mesir terhadap Israel. Nasser bersama rekan-rekan sesama perwira kemudian membentuk *Free Officers* yang bertujuan untuk menggulingkan raja Faruq, menghilangkan pengaruh Inggris, mendirikan keadilan sosial dan demokrasi, mendirikan angkatan bersenjata yang kuat, serta menghilangkan pengaruh politik dari para pemodal asing.⁴

Pada bulan Juli 1952 kudeta terhadap raja Faruq dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Tanpa menimbulkan konflik bersenjata, raja Faruq pada akhirnya dapat digulingkan oleh kelompok *Free Officers* dan untuk membentuk pemerintahan transisi para perwira tersebut membentuk *Revolutionary Command Council* (RCC) yang dipimpin oleh Jendral Muhammad Naguib. Namun demikian secara sesungguhnya RCC digerakkan oleh Nasser. RCC secara cepat bergerak membersihkan aparatus pemerintahan raja Faruq dan menggantikannya dengan para pejabat baru, yang mayoritas berasal dari kalangan militer. Bahkan pada tahun 1954 RCC melarang semua yang pernah menjadi pejabat dari tahun 1946 sampai 1952, untuk diangkat kembali menjadi pejabat. Hal ini berarti menutup karir semua pejabat pemerintahan yang berasal dari masa raja Faruq. Pada tahun 1953 RCC membubarkan parlemen dan konstitusi 1923, serta mendeklarasikan Mesir sebagai republik yang secara otomatis menghapuskan monarki.⁵ Raja Faruq pada akhirnya mengasingkan diri ke Prancis dan meninggal di pengasingan.

RCC tidak hanya menghapus aparatus monarki Mesir, namun juga melakukan pembersihan terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi untuk melawan RCC. Selain membubarkan parlemen RCC juga menghapus partai politik pada tahun 1953. Salah satu partai yang terpukul adalah Partai Wafd, sebuah partai politik terbesar di Mesir pada era 1940an dan 1950an. Para anggota Partai Wafd satu persatu kehilangan jabatan di kursi pemerintahan ketika RCC mengisi jabatan-jabatan penting di pemerintahan dengan perwira militer.

Kelompok organisasi politik yang juga menjadi sasaran utama RCC adalah Ikhwanul Muslim (IM). Sebuah kelompok yang memperjuangkan berdirinya negara Islam di Mesir, IM jelas

merupakan kelompok yang berpotensi untuk menjadi musuh RCC dalam usaha mereka untuk mendirikan republik Mesir. Gerakan IM yang didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928 di Ismailiya mendapatkan banyak pengikut di Mesir. IM tidak hanya menyerukan semangat keadilan, namun IM juga mendirikan sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu, klinik kesehatan untuk warga miskin dan bantuan-bantuan lainnya untuk warga Mesir.⁶ Tidak hanya retorika yang diberikan oleh IM, namun organisasi tersebut mengimplementasikan apa yang mereka perjuangkan secara nyata. Hal ini yang menyebabkan IM mendapat banyak simpati oleh warga Mesir. Namun demikian politik Islam yang diperjuangkan oleh IM berseberangan oleh RCC yang ingin mengedepankan nasionalisme Mesir, bukan sisi keagamaan. RCC menganggap IM dapat menjadikan ganjalan, apalagi dengan jumlah simpatisan yang signifikan, RCC tentu tidak memandang IM sebelah mata.

Para perwira militer yang tergabung dalam RCC berusaha untuk memberangus IM pada tahun 1954, disaat IM berusaha untuk melakukan pembunuhan terhadap Nasser. RCC dengan cepat melakukan pembersihan terhadap IM, dengan mengeksekusi enam anggota IM, bahkan melarang IM untuk beroperasi di Mesir.⁷ Selama masa kepemimpinan Nasser, Sadat, bahkan Mubarak, IM dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Mesir.

Namun meskipun RCC melakukan tindakan yang represif terhadap rakyat Mesir, RCC juga memberikan hak yang lebih luas bagi sebagian warga Mesir. Undang-undang agraria dirubah oleh RCC untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Hukum Reformasi Agraria yang disahkan pada tahun 1952, membatasi kepemilikan hak tanah menjadi tidak lebih dari 200 are, upah buruh tani dinaikkan, dan harga sewa tanah diturunkan.⁸ Bendungan Aswan juga dibangun oleh pemerintah Mesir untuk membuka sistem irigasi baru. Dengan harapan untuk meningkatkan produksi pangan.

Di antara usaha pembangunan ekonomi Mesir dan pembersihan lawan politik, terdapat pertikaian di dalam RCC sendiri. Nasser dan Jendral Naguib

⁶ Milton-Edwards, Beverly. *Contemporary Politics in the Middle East*. Polity Press: Cambridge. 2005. Hal. 129-132.

⁷ Cleveland, William L. hal. 306.

⁸ *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*. Hal. 347.

⁴ Cleveland, William L. hal. 305.

⁵ Cleveland, William L. hal. 306.

berusaha untuk menampilkan diri sebagai pemimpin RCC. Bahkan Naguib menjadi salah satu pemimpin RCC yang populer, dan yang membuat sebagian anggota RCC tidak berkenan dengan Naguib adalah pernyataan Naguib yang kadangkala berbeda dengan pernyataan anggota RCC lainnya.⁹ Untuk menyelesaikan masalah ini, Nasser kemudian menyingkirkan Naguib dengan tuduhan mempunyai afiliasi dengan IM. Naguib kemudian diturunkan dari kursi kepresidenan dan menjadi tahanan rumah sampai meninggal.

Nasser pada tahun 1954 menjadi presiden Mesir sampai akhir hayatnya pada tahun 1970. Dia digantikan oleh Anwar Sadat, mantan Jendral Angkatan Udara Mesir, yang sebelumnya menjabat wakil presiden. Ketika menjabat sebagai presiden, Sadat juga berlaku represif terhadap pihak oposisi. Namun yang membuat Sadat terbunuh adalah inisiasi yang dilakukan Sadat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, pada tahun 1979.¹⁰ Kelompok politik Islam kemudian membunuh Sadat ketika dia menghadiri upacara militer pada tahun 1981. Sejak saat itu, Jendral Husni Mubarak diangkat menjadi presiden Mesir.

III. LIBYA

Pemberontakan terhadap pemimpin Libya Muammar Gaddafi yang dimulai di Benghazi sejak bulan Februari 2011, membuat mata dunia melihat ke Libya. Gaddafi yang dianggap sebagai salah satu pemimpin terlama dan terkuat di Benua Afrika, pada akhirnya harus menghadapi gerakan masyarakat yang ingin menurunkan dia. Sebagai seorang diktator, Gaddafi dikenal sebagai pemimpin yang sangat represif terhadap para oposisi. Namun banyak pengamat yang tidak menyangka bahwa, pada awal tahun 2011 warga Libya melakukan aksi besar-besaran menentang Gaddafi. Bahkan aksi tersebut berbuah pada perang saudara antara kelompok yang anti dan pro terhadap Gaddafi.

Seperti halnya di Mesir, Gaddafi mendapatkan kekuasaan melalui kudeta tidak berdarah terhadap pemerintahan monarki di Libya. Kudeta yang dilakukan pada tahun 1969 oleh Gaddafi yang memimpin kelompok perwira militer, berhasil menggulingkan pemerintahan Raja Idris. Para

perwira militer Libya kemudian menguasai politik di negara Afrika Utara tersebut. Raja Libya tersebut pada akhirnya meninggal di pengasingannya di Kairo, Mesir.

Hal yang menyebabkan Gaddafi melakukan kudeta terhadap Raja Idris adalah, cara pemerintahannya yang dianggap kurang efektif. Raja yang mulai memerintah pada tahun 1951 tersebut, adalah seorang bangsawan dari wilayah Cyrenaica di sebelah timur Libya. Sedangkan sebagai seorang pemimpin negara, Idris harus tinggal di istana yang terletak di Tripoli, di sebelah barat Libya. Banyak tuduhan terhadap Idris, pasca kudeta yang menyatakan bahwa, Idris lebih memperhatikan pembangunan wilayah Cyrenaica daripada wilayah lainnya. Meskipun banyak sumber yang menyatakan bahwa dalam masa pemerintahannya, Idris berusaha untuk membangun Libya, terutama di bidang infrastruktur dan pendidikan. Namun yang pasti adalah sistem pemerintahan monarki Libya yang memakai sistem monarki absolut.

Warga Libya hanya berhak memilih anggota parlemen yang setingkat DPR, namun anggota parlemen yang setingkat MPR ditunjuk oleh Idris. Semua gubernur dan kabinet ditunjuk oleh Idris. Sistem ini melegitimasi kekuasaan Idris yang sangat besar dan membuat hampir semua politikus berusaha untuk mendekati sang raja.¹¹ Keadaan mulai menjadi buruk ketika memasuki dekade 1960an. Idris memasuki usia 70an dan tidak lagi mengawasi pemerintahan secara langsung. Usianya yang renta membuat Idris lebih mempercayakan kepada anggota kabinetnya untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun banyak di antara pejabat Libya yang kemudian menyalahgunakan jabatan dan memperkaya diri mereka. Inilah yang memicu para perwira Libya, terutama dari Korps Sinyal, untuk melakukan kudeta pada tahun 1969.

Sama seperti di Mesir, kudeta yang dilakukan oleh Gaddafi adalah kudeta tidak berdarah. Semua berjalan dengan lancar, dan pemerintahan Raja Idris beralih ke pemerintahan republik. Gaddafi, seperti Nasser, membentuk pemerintahan transisi yang diberi nama *Revolutionary Command Council* (RCC) persis seperti yang dilakukan oleh Nasser. RCC di Libya juga terdiri dari para perwira angkatan bersenjata Libya dan memegang tampuk pemerintahan sampai pada tahun 1977. Setelah berhasil menguasai Libya, Gaddafi berusaha untuk

⁹ Cleveland, William L. hal. 307.

¹⁰ *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*. Hal. 355.

¹¹ *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*. Hal. 380.

membangun negaranya agar pondasi kekuasaannya kuat.

Dengan semangat sosialisme, seperti yang tercantum dalam Buku Hijau yang dikeluarkan oleh Gaddafi sebagai panduan ideologi, perusahaan asing seperti bank dinasionalisasi. Pemerintah baru Libya juga berusaha untuk melakukan negosiasi ulang dengan perusahaan minyak asing, agar mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Usaha ini membuahkan hasil. Dari sektor minyak, Gaddafi dan pemerintahnya berhasil menggenjot pendapatan Libya dari US\$ 1.175 Juta di tahun 1969, menjadi US\$ 6 Milyar pada tahun 1974.¹² Dengan hasil migas ini, Gaddafi membangun infrastruktur, sekolah, universitas, dan sektor lainnya. Di masa pemerintahan Republik Libya, warga semakin berpendidikan dan angka buta huruf semakin menurun.

Meskipun Gaddafi banyak membangun infrastruktur, hal ini tidak serta merta membuat dia dicintai rakyatnya. Gaddafi secara terbuka mengatakan bahwa Islam dan politik bukanlah suatu hal yang menjadi satu. Agama dan politik adalah hal yang terpisah. Bahkan dia mengatakan bahwa ulama sebenarnya tidak begitu diperlukan, sebab Al-Qur'an ditulis dalam bahasa Arab, jadi untuk apa warga memerlukan interpretasi ulama. Karena warga Libya menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan mereka.¹³ Ini salah satu penyebab munculnya kelompok Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Harakat al-Islamiya, Al-Takfir wa al-Hijra, dan kelompok politik Islam lainnya di Libya yang menentang pemerintahan Gaddafi terutama sejak dekade 1990an.

Tidak hanya Gaddafi tidak disukai oleh kelompok Islam, dia juga tidak disukai kalangan oposisi lainnya dikarenakan sifat pemerintahannya yang otoriter. Gaddafi tidak segan-segan memberangus partai politik yang menentangnya. Bahkan sekelompok angkatan bersenjata Libya menentang Gaddafi, dan melakukan pemberontakan pada dekade 1980an dan tahun 1993, namun dapat dikalahkan. Pada tahun 1981, kelompok monarki membentuk Persatuan Konstitusi Libya di tahun 1981. Sedangkan Front Nasional Untuk Pembebasan Libya didirikan pada tahun 1981 untuk

menyatukan kelompok nasionalis dan politik Islam, untuk membentuk satu barisan melawan Gaddafi.

Semua kejadian ini membuat Gaddafi merombak militer Libya dan membentuk pasukan paramiliter yang loyal kepadanya, yaitu Garda Jamahiri dan Milisi Rakyat pada tahun 1988. Merombak kabinet dan struktur kepartaian sejak dekade 1970an. Namun hal yang membuat Gaddafi berada di tampuk kekuasaan sejak 1969 sampai pada dekade 2000an adalah persekutuan antar suku yang dia bentuk. Menurut harian Asharq al-Awsat, ada sekitar tiga puluh suku di Libya.¹⁴ Gaddafi dengan keahliannya berusaha untuk membuat agar suku-suku di Libya loyal terhadapnya, atau setidaknya mengakui pemerintahannya. Pemimpin Libya tersebut memberikan kedudukan di pemerintahan atau di parlemen kepada para pemuka suku. Memberikan kesempatan bagi anggota suku-suku ini untuk menduduki jabatan penting di angkatan bersenjata. Serta membangun infrastruktur di daerah yang didiami suku-suku ini.¹⁵ Gaddafi sendiri berasal dari suku Gaddafi yang sebetulnya bukanlah suku yang signifikan dalam sejarah Libya, sampai pada saat Muammar Gaddafi berkuasa.

Taktik Gaddafi untuk mengontrol suku-suku di Libya sangat beralasan. Sekitar 85 persen dari penduduk Libya mempunyai afiliasi dengan suku tertentu.¹⁶ Pemberontakan yang dilakukan oleh warga Libya pada tahun 2011, tidak lepas dari peran para pemuka suku. Kelompok pro dan anti Gaddafi dapat diidentifikasi menurut afiliasi kesukuan. Tentu yang memihak Gaddafi adalah suku Gaddafi sendiri, dan sebagian dari suku Margahira. Sedangkan dari kelompok anti Gaddafi terdapat suku Warfala, Tahuna, Zawiya, Zentan, Bani Walid dan Obeidat.¹⁷ Para anggota suku ini merasa bahwa Gaddafi tidak dapat lagi dijadikan pemimpin, terutama dengan gaya kediktatorannya yang membuatnya dibenci oleh warga Libya.

Libya bisa jadi sebuah negara yang unik, terutama jika ditinjau dari bagaimana Gaddafi berusaha untuk mengontrol suku-suku yang ada. Dengan mencontoh Nasser, sampai dengan RCC ala Mesir, Gaddafi berusaha untuk membentuk sebuah negara dengan sistem pemerintahan republik dengan warna sosialisme. Kepemimpinan diktatornya membuat

¹² *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*. Hal. 373-374.

¹³ *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*. Hal. 382.

¹⁴ <http://www.asharq-e.com>

¹⁵ www.telegraph.co.uk/news/worldnews

¹⁶ <http://www.asharq-e.com>

¹⁷ www.telegraph.co.uk/news/worldnews

Gaddafi berbenturan dengan berbagai pihak, kaum nasionalis, kelompok kesukuan, pengikut monarki dan kelompok politik Islam. Sama seperti di Mesir, Gaddafi berusaha untuk membuat Libya menjadi negara yang sistem politiknya terbebas dari pengaruh agama. Ini sama seperti yang terjadi di Suriah, sebuah negara Arab yang berpenduduk sangat heterogen dari segi agama.

IV. SURIAH

Berbeda dengan Libya atau Mesir yang dipimpin oleh individu yang berasal dari golongan mayoritas, Suriah dipimpin oleh golongan minoritas. Tentu ini membuat cara mengelola kekuasaan menjadi berbeda. Tindakan represif dengan kekerasan tetap menjadi siasat yang dilakukan oleh keluarga Al-Assad. Namun sebagai kelompok minoritas, keluarga Al-Assad juga berusaha untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, yang terlihat sangat pragmatis.

Sebagai bagian dari Dunia Arab, Suriah mempunyai peran dan posisi penting. Damaskus, pernah menjadi ibukota Dinasti Bani Umayyah dan menjadi salah satu pusat kebudayaan Arab. Damaskus menjadi salah satu tempat, bagi warga di luar Timur Tengah, sebagai tempat untuk belajar bahasa Arab. Ditambah lagi letak geografis yang berbatasan langsung dengan Israel, terutama dengan perebutan teritori Dataran Tinggi Golan yang diklaim oleh negara Yahudi tersebut. Ini adalah sebagian hal yang menyebabkan Suriah menjadi bagian penting di Dunia Arab, baik dari segi politik, keamanan, maupun budaya.

Seperti halnya Mesir dan Libya, Suriah mengalami kudeta militer dan bahkan sempat merasakan pemerintahan rezim militer selama kurang lebih tiga dekade. Kudeta militer pertama dilakukan oleh Kolonel Husni Zaim pada tahun 1949, dengan menggulingkan pemerintahan Presiden Shukri al-Quwwatli. Alasan yang digunakan oleh Zaim adalah, pemerintahan al-Quwwatli yang korup dan berimplikasi pada kekalahan pasukan Suriah pada saat perang melawan Israel pada tahun 1948.¹⁸ Namun Zaim sendiri pada akhirnya tidak dapat mempertahankan pemerintahannya. Perbedaan pendapat antara politikus dan kelompok militer dalam menjalankan roda pemerintahan, serta kekecewaan dari kelompok minoritas yang menginginkan porsi yang lebih besar di jabatan

sipil maupun militer, membuat pemerintahan Zaim menjadi lemah. Ditambah lagi kalangan militer yang kecewa dengan Zaim, disaat jabatan kemiliteran didasarkan oleh kedekatan dengan sang komandan, bukan berdasarkan kemampuan. Semua kejadian ini membuat pemerintahan Zaim berjalan dengan tidak efektif dan membuat kalangan militer berpendapat bahwa Zaim harus digulingkan.

Hanya dalam waktu empat setengah bulan, pemerintahan Kolonel Zaim berakhir. Kudeta yang dilakukan oleh Kolonel Sami Hinnawi berhasil menurunkan Zaim, namun Hinnawi sendiri tidak berlangsung lama, dia diturunkan oleh sebuah kudeta yang dilakukan oleh Kolonel Adib Shishakli pada tahun 1950. Shishakli memerintah Suriah dengan tangan besi. Segala bentuk perlawanan terhadap pemerintahannya diberangus. Pada tahun 1951 dia melarang partai politik, persatuan pelajar dan perkumpulan pekerja. Hanya ada satu organisasi politik yang diperbolehkan di Suriah, yaitu Gerakan Pembebasan Arab.¹⁹ Pola pemerintahan Shishakli pada akhirnya membuat seluruh rakyat Suriah muak dan melakukan pemberontakan. Dengan didukung oleh element angkatan bersenjata, Shishakli berhasil diturunkan dan pemerintahan Suriah sekali lagi berganti kepada pemerintahan sipil pada tahun 1954.

Pada masa pemerintahan sipil ini, partai-partai politik bermunculan. Salah satu yang terkuat adalah Partai Ba'ath yang didirikan oleh Michel Aflaq dan Salahudin al-Bittar. Sebagai partai yang mengusung gerakan sosialisme dan nasionalisme Arab, Partai Ba'ath membuat banyak warga Suriah tertarik untuk bergabung. Salah satu yang bergabung adalah Hafiz al-Assad yang menjadi kader sejak masih dibangku sekolah menengah atas. Sebagai kelompok minoritas dari warga beragama Allawiyah (sebuah agama sempalan dari Islam Syiah), Hafiz al-Assad tertarik untuk bergabung dengan Partai Ba'ath karena partai tersebut mendukung sekularisme, dengan tidak membedakan agama.²⁰ Hal ini yang membuat al-Assad tetap menjadi loyalis Partai Ba'ath meskipun dia menjadi anggota Angkatan Udara Suriah. Bahkan ketika dinamika politik Suriah yang tidak stabil pada medio 1960an, al-Assad membantu sebuah kudeta pada tahun 1963 yang berhasil menempatkan Ba'ath sebagai partai yang paling berkuasa di Suriah.

¹⁸ Cleveland, William L. hal. 324.

¹⁹ *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*. Hal. 237-238.

²⁰ <http://www.answers.com>

Sejak tahun 1963, Hafiz al-Assad menjadi salah satu orang terkuat dalam jajaran militer Suriah. Bahkan dia sempat menjadi Kepala Staf Angkatan Udara dan dekat dengan kekuasaan baik di jajaran partai maupun kepresidenan. Dengan kekuatan politik yang dimilikinya ini al-Assad pada akhirnya mampu menyingkirkan bekas rekan-rekan seperjuangannya dari golongan Allawiyah seperti Salah al-Jadid dan dari Partai Ba'ath seperti Amin al-Hafiz. Pada tahun 1970, kudeta yang dilakukan Hafiz al-Assad berhasil menempatkan Jendral Angkatan Udara tersebut menjadi Presiden Suriah. Sebuah jabatan yang dia pegang sampai akhir hayatnya di tahun 2000.

Sebagai presiden, Hafiz al-Assad memimpin Suriah layaknya seorang diktator, namun sebagai seorang dari golongan minoritas dia kadangkala harus melakukan kompromi agar tetap berkuasa. Ketika al-Assad berkuasa, pada tahun 1973, dia berusaha untuk merubah konstitusi Suriah. Kata-kata yang menyatakan bahwa presiden harus dijabat oleh seorang Muslim, sempat diusahakan untuk dihapus. Usaha ini mendapat tentangan luas dari warga Muslim, khususnya dari kalangan Sunni. Pada akhirnya al-Assad melakukan semacam kompromi, dengan membuat seorang ulama Syiah yang terpandang di Suriah mengeluarkan fatwa bahwa Allawiyah adalah bagian dari Islam Syiah.²¹ Tentu hal ini membuat sebagian warga Sunni tidak puas, akan tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun. Namun paling tidak dari segi agama, al-Assad berada dalam posisi yang relatif aman.

Dalam hal menjaga relasi dengan warga Muslim, terutama dari golongan Sunni, yang menjadi mayoritas di Suriah, al-Assad memainkan peran ekonomi dan politik. Kader Partai Ba'ath yang mayoritas dari warga Muslim, mendapatkan jatah yang besar di parlemen. Warga Muslim juga mendapatkan jatah di kursi pemerintahan, terutama sebagai anggota kabinet. Tentu saja mereka berasal dari Partai Ba'ath. Sedangkan di sisi ekonomi, meskipun Partai Ba'ath berhaluan sosialis, Hafiz al-Assad memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi para pebisnis. Namun memang secara ideologis Partai Ba'ath tidak melarang sektor swasta, namun pemerintah harus menjadi aktor yang dominan dalam perekonomian.²² Bagi para pebisnis yang dekat dengan para petinggi Partai Ba'ath, atau pebisnis yang juga adalah kader partai, menjadi kalangan pebisnis yang berhasil. Praktek

kolusi dan korupsi kerap mewarnai dunia bisnis di Suriah, namun ini penting bagi al-Assad untuk mempertahankan legitimasinya. Terutama banyak dari kalangan pebisnis ini adalah warga Muslim.

Sedangkan warga minoritas, yaitu warga Druze, Kristen dan tentu saja Allawiyah, mendapatkan jabatan di sektor keamanan. Untuk mengamankan posisinya di sektor keamanan, al-Assad membuat angkatan bersenjata, badan intelijen, dan kepolisian dikuasai oleh kelompok minoritas. Posisi-posisi penting di angkatan bersenjata dan dinas intelijen diisi oleh warga minoritas, terutama dari golongan Allawiyah.²³ Bahkan al-Assad menunjuk adik kandungnya Rif'at al-Assad untuk memimpin pasukan elit yang dibentuk untuk menjaga rezimnya. Pasukan Rif'at al-Assad yang beranggotakan 55.000 orang berjasa dalam menjaga rezim kakaknya dengan berpartisipasi dalam mengalahkan pemberontakan Ikhwanul Muslimin di Hama pada tahun 1982.²⁴ Namun pada akhirnya Rif'at yang sangat berambisi untuk berkuasa, berusaha untuk menggulingkan pemerintahan kakaknya. Pada bulan Maret 1984, Rif'at memimpin pasukannya ke Damaskus. Hafiz langsung menahannya dan pada akhirnya setelah menyadari bahwa dukungan Partai Ba'ath dan militer terhadap kakaknya sangat kuat, Rif'at mundur dan mengasingkan diri di Eropa.

Instrument kekuasaan al-Assad lainnya adalah *mukhabarat*, yaitu polisi rahasia yang bertugas untuk memata-matai dan menangkap warga yang melawan pemerintahannya. Mukhabarat tidak segan-segan dalam melakukan penangkapan terhadap para kelompok oposisi. Penyiksaan bahkan pembunuhan kerap dilakukan oleh anggota mukhabarat.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa al-Assad juga melakukan cara-cara represif dalam menghadapi kelompok oposisi. Namun kondisi ini tidak membuat kelompok oposisi surut dalam melawan rezim diktator al-Assad. Pada tahun 1982, anggota Ikhwanul Muslimin dan kelompok oposisi lainnya melakukan pemberontakan di kota Hama. Ikhwanul Muslimin (IM) sejak awal menentang pemerintahan Hafiz al-Assad yang berasal dari golongan Allawiyah. Sejak tahun 1976, anggota IM mulai melakukan pembunuhan terhadap politisi, serta pejabat militer maupun sipil yang berasal dari

²¹ Cleveland, William L. hal. 400.

²² <http://www.answers.com>

²³ Cleveland, William L. hal. 401.

²⁴ George, Alan. *Syria; Neither Bread Nor Freedom*. Zed Books; London: 2003. hal. 16-17.

²⁵ George, Alan. Hal. 91.

warga Allawiyah.²⁶ Pemberontakan di Hama menjadi puncak pemberontakan IM. Respon al-Assad sangat cepat dan brutal. Kota tersebut dikepung selama dua bulan, sebelum diserang oleh pasukan angkatan darat Suriah. Pemberontakan tersebut dapat dipadamkan setelah tentara Suriah membunuh lebih dari 8.000 orang.

Hafiz al-Assad dapat mempertahankan kekuasaannya dengan melakukan manuver yang membuat aparatus kekuasaan Suriah mendukungnya. Warga Muslim dan kalangan sipil yang berpengaruh mendukungnya karena Partai Ba'ath tetap menjadi partai terbesar di Suriah, meskipun hal itu dilakukan tanpa cara yang demokratis. Bahkan di antara mereka mendapatkan jatah di kabinet. Kalangan pebisnis yang sebagian besar adalah warga Muslim, mendapatkan keuntungan yang besar, selama dekat dengan pengurus partai. Sedangkan warga minoritas, terutama warga Allawiyah mendapatkan jatah di dinas intelijen dan angkatan bersenjata. Ini membuat al-Assad aman dari kudeta militer. Di sisi lain kelompok oposisi secara sistematis ditekan oleh al-Assad melalui angkatan bersenjata, dinas intelijen, serta anggota mukhabarat yang tidak segan-segan melakukan tindakan brutal terhadap kelompok oposisi. Hal ini yang membuat Hafiz al-Assad dapat mempertahankan kekuasaannya sampai wafatnya di tahun 2000.

V. KEKUATAN REZIM MILITER DI DUNIA ARAB

Fenomena pemerintahan rezim militer tidak hanya terjadi di Dunia Arab, namun juga terjadi di Amerika Latin, Asia dan Afrika. Sebagian yang terkenal adalah Idi Amin di Uganda, Soeharto di Indonesia dan Augusto Pinochet di Chili. Fenomena rezim militer, menjadi salah satu subyek penelitian bagi penstudi ilmu politik. Salah satu akademisi ilmu politik, S.E. Finer menulis sebuah buku yang memetakan kekuatan dan landasan rezim militer di berbagai belahan dunia. Menurutnya, rezim militer di seluruh dunia mempunyai motif yang hampir sama dan sumber kekuatan yang hampir sama.

Militer adalah sebuah institusi yang mempunyai doktrin, bahwa mereka adalah penjaga negara. Nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme ditanamkan di akademi militer di seluruh dunia.

Prajurit tidak hanya ditanamkan nilai-nilai bahwa mereka harus menghadapi ancaman dari luar, namun mereka juga harus menghadapi ancaman dari dalam yang dapat merusak negara. Dengan kata lain, banyak perwira militer yang merasa bahwa, jika institusi tidak dapat lagi dipercaya untuk menjaga negara, maka sebagai penyelamat bangsa, militer harus bergerak sebagai penyelamat.²⁷ Ketika Raja Idris dianggap tidak lagi mampu untuk memegang pemerintahan yang dianggap semakin korup dan tidak efektif, Kolonel Muammar Gaddafi melakukan kudeta. Ketika Raja Faruq dianggap lemah terhadap intervensi Inggris di Mesir dan tidak dapat mensejahterakan rakyat, Kolonel Gamal Abdul Nasser melakukan kudeta. Ketika Shukri al-Quwwatli dianggap korup dan berimplikasi pada kekalahan Suriah di Perang 1947 melawan Israel, Kolonel Husni Zaim melakukan kudeta. Para perwira ini melihat bahwa pemerintahan sipil tidak lagi dapat diandalkan untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Sebab itu, mereka harus menyelamatkan negara dengan mengambil alih kekuasaan.

Selain dorongan untuk melakukan kudeta yang hampir sama, langkah yang diambil oleh para perwira militer juga hampir sama. Kecuali di Suriah, Nasser dan Gaddafi sama-sama membentuk RCC. Nasser sempat menyatakan bahwa RCC dibentuk hanya sebagai pemerintahan sementara selama masa transisi. Begitupun yang terjadi di Libya. Namun pada akhirnya pemerintahan militer ini berlangsung selama lebih dari dua puluh tahun. Berbeda dengan di Suriah, yang tidak menyatakan bahwa pemerintahan militer adalah pemerintahan transisi.

Berhasilnya kudeta militer di Dunia Arab dan berlangsungnya rezim tersebut selama lebih dari dua dekade, menunjukkan bahwa rezim militer mempunyai kekuatan politik. Menurut Finner, kekuatan militer ada pada struktur militer yang membuat institusi ini mempunyai kekuatan politik. Struktur tersebut adalah komando yang terpusat, hirarki, disiplin, interkomunikasi, dan *esprit de corps*.²⁸ Kelima struktur ini membuat militer cenderung kompak, karena mereka patuh kepada atasan dan siap untuk melakukan tugas di manapun, kapanpun, dan apapun tugas tersebut. Prajurit juga terlatih sebagai manusia yang disiplin dalam

²⁶ George, Alan. Hal 15.

²⁷ Finer, S.E. *The Man on Horseback; The Role of the Military in Politics*. Frederick A. Praeger; New York: 1962. hal. 32-33.

²⁸ Finer, S.E. hal. 7.

menjalankan sesuatu, sehingga ketepatan waktu dan penyelesaian tugas menjadi tujuan mereka. Hal ini membuat mereka selalu menjaga jalur komunikasi, yang sangat menentukan dalam melakukan sebuah operasi, termasuk dalam melakukan kudeta. Di tambah lagi dengan *esprit de corps* mereka, yang membuat prajurit saling melindungi satu sama lain. Tentu di Suriah, *esprit de corps* dapat diperdebatkan, mengapa Kolonel Zaim dikudeta oleh Kolonel Hinnawi yang kemudian dikudeta oleh Kolonel Shishakli. Namun dalam kasus Libya dan Mesir, selain percobaan kudeta oleh sebagian aparatus militer Libya, pemerintahan Gaddafi, Nasser, Sadat dan Mubarak relatif aman dari ancaman kudeta militer.

Hal lain yang membuat rezim militer di Timur Tengah dan Afrika menarik perhatian adalah status kelas dalam masyarakat. Finer melihat bahwa para perwira yang memimpin kudeta, sebagian adalah mereka yang berasal dari kalangan bawah. Sebagian dari para perwira ini dahulu adalah anak dari pegawai rendah, pedagang kecil atau petani. Masuk ke akademi militer dan menjadi perwira, adalah jalan bagi mereka untuk menempuh kehidupan yang lebih baik. Karena akademi militer adalah sekolah yang tidak dipungut biaya, yang menjadi tujuan bagi pemuda yang tidak mampu secara finansial untuk melanjutkan pendidikan. Ayah Gamal Abdul Nasser adalah seorang pegawai kantor pos. Gaddafi, berasal dari keluarga petani miskin, begitu pula dengan Hafiz al-Assad. Ketika mereka berkuasa, orang-orang di sekeliling mereka yang diangkat menjadi pejabat seringkali berasal dari strata sosial yang sama.²⁹ Baik itu yang berasal dari militer maupun sipil. Ini menjadi salah satu penopang rezim untuk menghindari adanya oposisi terhadap pemerintah. Namun ini bukan menjadi satu-satunya faktor penentu kekuatan rezim, ada juga hal lain yang dapat dilakukan seperti di Libya dan Suriah. Aliansi kesukuan yang dibangun oleh Gaddafi, serta aliansi politik kelompok minoritas di Suriah juga menjadi kekuatan politik rezim tersebut.

Berlangsungnya rezim militer ini tidak hanya terjadi karena adanya konsolidasi politik dalam negeri, akan tetapi kekuatan asing ikut menopang keberlangsungan rezim militer di Dunia Arab. Letak Timur Tengah dan Afrika Utara yang strategis, yang dekat dengan Eropa. Ditambah dengan kandungan minyak yang banyak di kawasan tersebut, membuat negara-negara adidaya berusaha

untuk menancapkan pengaruhnya di kawasan tersebut.³⁰ Cara yang dilakukan adalah dengan mendukung pemerintahan di Timur Tengah dan Afrika Utara, terlepas dari apakah pemerintahan yang ada adalah diktator atau bukan, selama pemerintahan tersebut dapat mendukung atau menopang kepentingan nasional negara-negara adidaya.

Perang Dingin adalah masa saat Timur Tengah dan Afrika Utara mulai menjadi wilayah yang diperebutkan. Pihak Barat dan Uni Sovyet berusaha untuk melebarkan pengaruhnya di kawasan tersebut, untuk mendapatkan minyak serta mengamankan Terusan Suez. Seperti yang terjadi pada Mesir, pada saat Gamal Abdul Nasser Mesir lebih condong kepada Uni Sovyet, meskipun menjadi anggota negara Non-Blok. Persenjataan Mesir di masa Nasser, sebagian besar disuplai oleh Uni Sovyet. Namun keadaan berubah ketika Anwar Sadat menjadi presiden. Mesir menjadi lebih condong ke Barat, terutama ke Amerika Serikat. Sejak 1979, saat Sadat membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Mesir mendapatkan sekitar US \$ 2 milyar setiap tahun dari Amerika Serikat (AS). Mesir menempati urutan kedua sebagai negara di Timur Tengah yang mendapatkan bantuan dana terbesar dari AS setelah Israel.³¹ Tentu ini memperkuat posisi AS di Timur Tengah dengan menggandeng Sadat yang kemudian dilanjutkan dengan Mubarak, sebab Mesir adalah salah satu negara penting dalam percaturan politik di kawasan itu.

Libya yang pada masa 1980an dicap sebagai salah satu negara pendukung terorisme, sempat memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan AS. Pemerintah AS di bawah kepemimpinan George W. Bush, sangat agresif dalam memerangi kelompok politik Islam pasca kejadian 11 September 2001. Gaddafi yang juga menghadapi kelompok politik Islam berusaha memperbaiki hubungannya dengan AS untuk memerangi kelompok politik Islam. Dengan memanfaatkan momen pasca 11 September, Libya dan AS memperbaiki hubungan diplomatik. Di dalam pernyataannya, Condoleezza Rice yang menjabat sebagai menteri luar negeri AS di kabinet Bush, menyatakan bahwa perbaikan hubungan diplomatik AS-Libya diperlukan salah

³⁰ Milton-Edwards, Beverly & Peter Hinchcliffe. *Conflicts in the Middle East Since 1945*. Routledge: London. 2004. hal. 38-45.

³¹ <http://www.reuters.com>

²⁹ Finer, S.E. hal. 42.

satunya dalam memerangi terorisme.³² Hal ini sempat memperkuat kedudukan Gaddafi yang sebelumnya tidak didukung Barat, menjadi sahabat Barat. Tentu saja setelah terjadinya perang saudara di Libya, rakyat AS mempertanyakan mengapa pemerintah mereka sempat memperbaiki hubungan diplomatik dengan Gaddafi.³³ Warga AS tetap melihat Gaddafi sebagai seorang diktator yang tidak pantasnya mendapat dukungan.

Akan tetapi seringkali kepentingan nasional tidak menghiraukan moralitas, atau kepentingan negara-negara yang menjadi subyek kebijakan luar negeri. Menurut akademisi Inggris Beverley Milton-Edwards dan Peter Hinchcliffe, AS mempunyai beberapa obyektif di Timur Tengah dan Afrika yaitu; ekonomi, kontainmen, komitmen, bantuan, serta senjata.³⁴ Ekonomi tentu tidak terlepas dari minyak, serta Timur Tengah dan Afrika Utara yang masyarakatnya menjadi market yang potensial bagi produk AS. Kontainmen adalah kebijakan saat Perang Dingin untuk menahan pengaruh Uni Sovyet. Komitmen, adalah komitmen untuk menjaga keberlangsungan Israel. Bantuan sebagai alat untuk mendapatkan teman di kawasan tersebut, seperti dengan memberikan bantuan ke Mesir dan Israel. Senjata yang tidak lepas dari faktor ekonomi, sebab wilayah ini menjadi pasar yang sangat potensial bagi pabrik senjata. Faktor-faktor inilah yang membuat AS dan negara-negara besar lainnya, terus menempatkan Dunia Arab sebagai bagian penting bagi kebijakan luar negeri.

VI. KESIMPULAN

Rezim militer yang diktator di Dunia Arab mendapatkan kekuatan mereka dari konsolidasi di dalam negeri yang dilakukan oleh masing-masing pemimpin. Baik itu melalui ikatan kekeluargaan, kesukuan, institusi militer, kelas sosial, bahkan agama. Semua hal yang bisa menjadi pengikat kekuatan dimaksimalkan, sehingga mereka dapat menduduki tampuk kekuasaan selama mungkin. Bentuk pemerintahan yang otoriter ini diperlukan karena. *Pertama*, mereka mendapatkan kekuasaan melalui kudeta sehingga "tradisi" kudeta selalu menjadi penting untuk dihapuskan. *Kedua*, kekecewaan masyarakat yang ditimbulkan dari pemerintahan para diktator ini membuat munculnya

oposisi terhadap pemerintahan Mubarak, Gaddafi dan al-Assad, terutama dari kelompok politik Islam. Ini membuat respon pemerintah menjadi lebih opresif dengan memperkuat institusi militer, serta memberangus kebebasan ekspresi masyarakat. *Ketiga*, seperti di Suriah, kelompok minoritas yang berkuasa harus memberlakukan pemerintahan yang otoriter agar dapat terus berkuasa. Ruang gerak oposisi dipersempit, karena pihak oposisi dapat mengobarkan sentimen warga mayoritas, sehingga institusi militer di Suriah diperkuat dengan menempatkan warga minoritas di jabatan strategis. Hal lain yang juga menjadi sumber kekuatan mereka adalah adanya dukungan dari negara-negara adidaya. Terutama AS, yang mempunyai kepentingan militer, ekonomi dan politik di Dunia Arab. Para pemimpin diktator ini, didekati dan disokong untuk pencapaian kepentingan nasional AS, meskipun kepemimpinan mereka bertolak belakang dari asas demokrasi dan hak asasi manusia yang digunakan oleh negara-negara Barat.

Meskipun pada awalnya motivasi yang digunakan oleh para pemimpin rezim militer di Dunia Arab terlihat mulia. Seperti untuk memajukan dan mensejahterakan warga negara, menghapus korupsi dan feodalisme, dan menghilangkan pengaruh asing di sektor ekonomi dan politik. Akan tetapi di saat para pemimpin ini berkuasa, mereka terbuai dengan kekuasaan yang mereka miliki, sehingga hanya memikirkan bagaimana mereka dapat menjadi presiden selama-lamanya, dengan mengabaikan kesejahteraan, keadilan, pendidikan bagi warga. Bahkan ketika mereka berkuasa pengaruh asing tetap kuat, seperti yang terjadi di Mesir, dan para pemimpin ini juga melakukan korupsi. Semua ini yang pada akhirnya memicu gerakan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara, untuk menggulingkan pemimpin mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cleveland, William L. *A History of The Modern Middle East*. Westview Press, Boulder: 2004.
- [2] Finer, S.E. *The Man on Horseback; The Role of the Military in Politics*. Frederick A. Praeger; New York: 1962.
- [3] George, Alan. *Syria; Neither Bread Nor Freedom*. Zed Books; London: 2003.
- [4] Milton-Edwards, Beverly & Peter Hinchcliffe. *Conflicts in the Middle East Since 1945*. Routledge: London. 2004.

³² www.carnegieendowment.org

³³ www.washingtonpost.com

³⁴ Milton-Edwards, Beverly & Peter Hinchcliffe. Hal. 38-39.

[5] *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*. David E. Long & Bernard Reich Ed. Westview Press: Boulder. 2002.

Internet

[6] <http://www.answers.com>

[7] <http://www.asharq-e.com>

[8] www.carnegieendowment.org

[9] <http://www.reuters.com>

[10] www.telegraph.co.uk/news/worldnews

[11] www.washingtonpost.com